### BAB I

### PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Masalah utama yang timbul pada wilayah bekas tambang adalah perubahan lingkungan. Perubahan kimiawi terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan. Lebih jauh lagi adalah perubahan iklim mikro yang disebabkan perubahan kecepatan angin, gangguan habitat biologi berupa flora dan fauna, serta penurunan produktivitas tanah dengan akibat menjadi tandus atau gundul. Mengacu kepada perubahan tersebut perlu dilakukan upaya reklamasi. Reklamasi dilakukan untuk menjaga lahan agar tidak labil dan lebih produktif. Akhirnya reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan (ekosistem). Dengan semakin bertambahnya jumlah populasi manusia, kebutuhan hidupnya pun meningkat, akibatnya terjadi peningkatan permintaan akan lahan seperti di sektor pertanian dan pertambangan. Sejalan dengan hal tersebut dan dengan semakin hebatnya kemampuan teknologi untuk memodifikasi alam, maka manusialah yang merupakan faktor yang paling penting dan dominan dalam merestorasi ekosistem rusak.

Kegiatan pembangunan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan,

yang selanjutnya mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kegiatan seperti pembukaan hutan, penambangan, pembukaan lahan pertanian dan pemukiman, bertanggung jawab terhadap kerusakan ekosistem yang terjadi. Akibat yang ditimbulkan antara lain kondisi fisik, kimia dan biologis tanah menjadi buruk, seperti contohnya lapisan tanah tidak berprofil, terjadi bulk density (pemadatan), kekurangan unsur hara yang penting, pH rendah, pencemaran oleh logam-logam berat pada lahan bekas tambang, serta penurunan populasi mikroba tanah. Untuk itu diperlukan adanya suatu kegiatan sebagai upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara merehabilitasi ekosistem yang rusak. Dengan rehabilitasi tersebut diharapkan akan mampu memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat pulih, mendekati atau bahkan lebih baik dibandingkan kondisi semula.

Kegiatan pertambangan bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Selama kurun waktu 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah sekala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan sekala pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan terutama berupa pencemaran air permukaan dan air tanah.

Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan bahan tambang lainnya apabila diekstraksi harus dalam perencanaan yang matang untuk mewujudkan proses pembangunan nasional berkelanjutan.<sup>2</sup> Di antara keberlanjutan pembangunan tersebut yaitu dapat terwujudnya masyarakat mandiri pasca penutupan/pengakhiran tambang. Aktifitas ekonomi tetap berjalan setelah pengakhiran tambang. Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan diupayakan menjadi lebih baik.<sup>3</sup>

Kegiatan penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh PT Jogja Magaza Mining (PT. JMM) ini berizin kuasa Pertambangan (KP) ekslorasi Bupati Kulon Progo. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT. Krakatau Steel (PT. KS) dan PT. JMM. PT KS saat ini adalah salah satu perusahaan baja hilir terbesar di Indonesia. Indo Mines Ltd merupakan perusahaan tambang dari Australia, yang akan membangun pabrik untuk mengolah pasir besi, dengan nilai investasi 600 juta dolar AS. Oleh karena ada unsur penanaman modal asing (PMA), maka Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi Bupati Kulon Progo tersebut ditingkatkan menjadi KK Pertambangan.

Wilayah konsesi KK PT. JMM (termasuk PT. KS dan Indon Mines) meliputi kawasan sepanjang 22 kilometer pesisir Kulon Progo, yang berada dalam wilayah 4 kecamatan, yaitu Temon, Wates, Panjatan, dan Galur. Menurut status tanah kawasan Pantai selatan tersebut terbagi dua, kawasan pantai sebelah Timur Sungai Progo ke

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arif, 2007. Perencanaan Tambang Total sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm 45.

Pertambangan, Peranan Asosiasi dalam Peningkatan Kualitas Program CSR Perusahaan

arah Kabupaten Bantul merupakan milik kraton Yogyakarta (Sultan Ground), sedangkan kawasan pantai sebelah barat Sungai Progo ke arah Kutoarjo merupakan tanah Pakualaman/ Pakualaman Ground.<sup>4</sup>

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi DIY telah memberikan izin terkait penambangan pasir besi tersebut. BLH berkesimpulan proyek pertambangan dengan operator PT Jogja Magasa Iron (JMI) telah memenuhi prosedur terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil kajian AMDAL BLH di pesisir pantai kawasan Temon Kulonprogo telah memenuhi persyaratan untuk didirikan kegiatan pertambangan. Kajian AMDAL meliputi aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat, sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau untuk kegiatan. AMDAL terdiri atas Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) serta Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

PT Jogja Megasa Iron (JMI) selaku operator penambangan pasir besi menggelar penanaman tanaman pertanian di lahan reklamasi, Arena pilot project diharapkan bisa menjadi pusat pembelajaran bagi warga Kulonprogo. Penanaman sekitar 10.441 bibit melon itu dilakukan di blok IA Pilot Project Karangwuni seluas satu hektare, dihadiri Wakil Presiden PT JMI, Chris O'Donnell dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagagangan dan ESDM Kulonprogo, Djunianto. Direktur Operasional PT JMI Staygraha Sumantri mengatakan penanaman bibit tanaman

Langran Tahunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2007.

pertanian merupakan bentuk komitmen perusahaan tersebut terhadap pelestarian lingkungan pasca-penambangan. Hal itu sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintah. PT. JMI menjamin pasca-penambangan lahan milik warga akan dikembalikan dan kualitasnya tidak jauh berbeda. Penanaman tersebut menjadi bukti lahan bisa digunakan untuk keperluan pertanian seusai diambil konsentratnya. Sementara itu, Kadis Perindag ESDM, Djunianto mengucapkan terima kasih atas komitmen PT JMI untuk turut melestarikan lingkungan. Ia mengharapkan perusahaan itu bisa membuka diri bagi warga masyarakat, termasuk para pelajar, yang ingin mempelajari tentang pertambangan. PT Jogja Magasa Iron bisa membuktikan komitmennya untuk melakukan reklamasi secara berkelanjutan kepada petani lahan pasir. <sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan reklamasi bekas *pilot project* tambang pasir besi PT. Jogja Magasa Iron di Kabupaten Kulon Progo.

## B. Perumusan Masalah.

- Bagaimanakah pelaksanaan reklamasi bekas pilot project tambang pasir besi
   PT. Jogja Magasa Iron di Kabupaten Kulon Progo?
- 2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan reklamasi bekas pilot project tambang pasir besi PT. Jogja Magasa Iron di Kabupaten Kulon Progo?.

# C. Tujuan Penelitian

- . Untuk mengetahui pelaksanaan reklamasi bekas *pilot project* tambang pasir besi PT. Jogja Magasa Iron di Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan reklamasi bekas *pilot project* tambang pasir besi PT. Jogja Magasa Iron di Kabupaten Kulon Progo.

## D. Manfaat Penelitian

. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan reklamasi bekas pilot project